

| STATUS PSBB JAKARTA |

# NASIB BURUK ANAK KOMUTER

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta yang tak berbarengan dengan kota sekitarnya ternyata melahirkan masalah baru, yaitu kesemrawutan transportasi massal di Jabodetabek.

Rinaldi M. Azka, Anita W. Puspa & Rio Sandy Pradana  
redaksi@bisnis.com

**S**enin (13/4) pagi, suami Murni yang tinggal di Cilebut Kabupaten Bogor berpamitan untuk berangkat dinas di Lembaga Ketahanan Nasional di bilangan Jakarta Pusat. Tak berapa lama, sang suami kembali lagi ke rumahnya karena tidak terangkut kereta rel listrik (KRL) Commuter Line di Stasiun Cilebut.

"Dapat laporan dari suami yang ke kantor. Dia tidak terangkut KRL," katanya kepada *Bisnis*.

Suami Murni adalah satu dari ribuan penumpang KRL dari wilayah penyangga Ibu Kota yang terpaksa balik kanan karena tak berhasil mengakses KRL meski sudah mengantre di stasiun. Alasannya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sudah menerapkan protokol pembatasan sosial berskala besar (PSBB) per 10 April 2020. Operasional KRL dibatasi hanya 12 jam dan kapasitas penun-

jang pun diturunkan hingga maksimal 50%.

Membeludaknya calon penumpang KRL di sejumlah stasiun tersebut terjadi akibat masih banyak kantor yang belum mewajibkan karyawannya bekerja dari rumah sehingga pergerakan orang yang menggunakan KRL tetap padat.

Kebijakan PSBB justru menjadi *blunder* karena, alih-alih menjaga jarak, calon penumpang justru bergerombol mengantre supaya bisa diangkut oleh transportasi massal berbasis kereta itu. Keramaian di stasiun itu justru berpotensi menjadi media penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Antrean dan penumpukan calon penumpang di stasiun kereta menjadi bukti betapa pemerintah tidak siap mengantisipasi PSBB.

Merespons hal itu, Direktur Teknik PT KCI Saridal menyatakan telah menyosialis-

sikan PSBB di Jakarta, tetapi jumlah penumpang masih membeludak.

Untuk menjamin ketentuan PSBB dipatuhi, dia menyatakan pihaknya menahang penumpang di gerbang masuk. "Ditahan pada *gate-gate* masuk dengan menutup pintu masuk. Namun, penumpang tetap memaksa dan pintu gerbang roboh. Contohnya di Stasiun Bojong Gede yang kami pantau dan saksikan sendiri," jelasnya.

Saridal menyebutkan antisipasi akibat ricuhnya penumpang tidak dapat dilakukan karena pemerintah daerah (pemda), dan Kepolisian tidak siap.

"Justru dari pemda, Dishub, Satpol PP sampai jam 7.30 WIB belum ada yang datang. Dari Polsek, setelah kami hubungi, datang jam 6.15," jelasnya.

Saridal juga menyebutkan

pihaknya telah menurunkan 4.000 personel, termasuk personel Marinir dari TNI Angkatan Laut guna membantu penerapan PSBB di stasiun.

Manager External Relations PT KCI Adli Hakim menambahkan di sejumlah stasiun pemberangkatan, animo masyarakat menggunakan moda transportasi KRL masih cukup besar. Hal itu terlihat di Stasiun Bogor, Cilebut, Bojong Gede, Citayam, dan Depok.

KCI juga menjalankan lima jadwal KRL tambahan, yaitu tiga dari Stasiun Bogor, satu dari Stasiun Bojong Gede, dan satu Stasiun Manggarai. "Kami harap pelaku usaha yang masih mengharuskan karyawannya bekerja di kantor juga dapat menginstruksikan karyawan bekerja dari rumah atau memberi kelonggaran jam kerja sehubungan adanya keterbatasan jam operasional dan kapasitas penumpang pada seluruh moda transportasi publik."

Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebutkan pemerintah terlalu fokus pada penyelesaian persoalan di hilir transportasi, tetapi lupa memikirkan persoalan dari hulu. Persoalan hulu yang semestinya bisa diantisipasi dengan baik di antaranya mengurangi jumlah kantor yang beroperasi.

Seyogyanya, operator transportasi juga belajar dari pengalaman sebelumnya dengan memberikan perhatian utama kepada lintasan kereta terpadat pada jam sibuk. "Perjalanan KRL pada hari ini [Senin] juga bisa menjadi pelajaran untuk mengevaluasi apakah sebaiknya jam operasional KRL dimulai lebih dini," ujarnya.

Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Maska) Hermanto Dwiyatmoko berpendapat sangat sulit menerapkan pembatasan jika pergerakan dari lintas Bogor tidak berkurang.

Selain itu, daya tarik masyarakat kelas bawah terhadap KRL memang besar karena mereka juga tak memiliki kendaraan pribadi yang lebih mumpuni. ☒

## MASIH JADI ANDALAN PELAJU

Keputusan Pemprov DKI Jakarta yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus corona ternyata tidak menyurutkan pelaju dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) tetap menyerbu Ibu Kota. Buktinya, kereta rel listrik (KRL) Commuter Line sebagai moda transportasi favorit bagi para penduduk di sekitar Jakarta masih dipadati pelaju setiap pagi dan sore hari.

### Data Penumpang Harian KRL Commuter Line (penumpang/hari)

Masa	Jumlah
normal	900.000-1,1 juta
pandemi COVID-19	200.000

### Penyesuaian Operasional Kereta Rel Listrik Per 10 April 2020



**Jam operasi**  
06.00 WIB-18.00 WIB



**Skema operasi**  
683 perjalanan KRL per hari



**Maksimal 1 Kereta**  
60 orang



**Jaga jarak**  
1 meter-2 meter

Sumber: PT Kereta Commuter Indonesia BISNIS/YAYAN INDRAYANA

### PEMBANGUNAN UNDERPASS SENEN EXTENSION



Bisnis/Dedi Gunawan

Pekerja menggunakan alat berat mengerjakan proyek pembangunan underpass Senen Extension di Jakarta, Senin (13/4). Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp121,1 miliar tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2020 dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan di kawasan tersebut.

### | PROGRAM PADAT KARYA TUNAI |

## PUPR Bidik Warga Desa & TKI

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat realisasi program padat karya tunai Rp10,22 triliun untuk menyerap tenaga kerja dan distribusi dana pembangunan di daerah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan padat karya tunai ditujukan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pandemi virus corona.

"Program padat karya tunai di Kementerian PUPR ini ada Rp10 triliun. Jadi, mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa masih bisa dilaksanakan karena kita masih memanfaatkan atau menggunakan protokol kesehatan," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung BNPB yang disiarkan secara daring, Senin (13/4).

Basuki menambahkan protokol kesehatan mengatur jumlah pekerja mini-

mal di lapangan. Dia mencontohkan untuk program perbaikan irigasi kecil yang biasanya dilakukan sekitar 70-80 orang akan dibagi dua menjadi 40 orang yang nantinya akan dibuat penjadwalan kerja per pekan. Penyelesaian diperkirakan lebih lama, yaitu sekitar 3 bulan dari biasanya 2 bulan.

Adapun mekanisme program padat karya tunai, lanjutnya, diawali dengan merekrut tenaga pendamping. Proses selanjutnya, sosialisasi dan pelaksanaan di lapangan. Upah pekerja akan dibayar secara mingguan. "Sekarang ini sudah mulai. Minggu pertama April sudah mulai di beberapa lokasi," ujarnya.

Basuki menambahkan program padat karya tunai ini juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri karena akan dilaksanakan di daerah tujuan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia. "Jadi tena-

ga kerja] yang pulang dari Malaysia, kami identifikasi dari mana asalnya, kami siapkan program padat karya, sehingga nanti mereka di desa setelah isolasi mandiri bisa bekerja di padat karya yang sudah kami siapkan," jelasnya.

Sebagai informasi, padat karya tunai terdiri atas beberapa program, yaitu Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi dengan dana Rp2,25 triliun. Selain itu, pemeliharaan rutin jalan 47.017 km Rp0,51 triliun dan pemeliharaan rutin jembatan 496 km Rp0,11 triliun.

Kemudian, program peningkatan kualitas rumah swadaya 208.000 unit Rp4,35 triliun. Program pembangunan baru rumah swadaya 12.000 unit Rp0,46 triliun.

Selanjutnya, program penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 364 kelurahan Rp0,38 triliun. Pembuatan *akuifer* buatan simpanan

air hujan (ABSAM) di 94 lokasi Rp0,03 triliun.

Program lain, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.771 desa dengan anggaran Rp1,12 triliun dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp0,39 triliun.

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan Rp0,54 triliun dan program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di 106 lokasi senilai Rp0,06 triliun.

Basuki menambahkan pihaknya juga akan membeli karet petani sebagai bahan campuran aspal.

"Kami siapkan Rp100 miliar yang langsung kami beli ke koperasi di kawasan penghasil karet, seperti Pontianak, Kalimantan Barat, Sumsel, Lampung, Jambi. Kemudian, kami juga akan beli rosian, campuran untuk cat dalam membuat marka jalan," jelasnya. (Agne Yasa)

www.bca.co.id



PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

### PENGUMUMAN

### JADWAL DAN TATA CARA

### PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") tanggal 9 April 2020, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebesar Rp55,- (lima ratus lima puluh lima rupiah) per saham, dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan dividen interim tunai tahun buku 2019 sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal 20 Desember 2019, sehingga sisa dividen per saham untuk tahun buku 2019 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp45,- (empat ratus lima puluh lima rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

#### A. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Surat Kabar	14 April 2020
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	20 April 2020 22 April 2020
3.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	21 April 2020 23 April 2020
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Record Date</i> )	22 April 2020
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	11 Mei 2020

#### B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 April 2020 pukul 16.15 WIB (*record date*).
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 11 Mei 2020 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham *warkat/script*), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
- Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 22 April 2020 pukul 16.15 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum menyerahkan NPWP, maka atas pembayaran dividen tunai akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (COR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun 2020, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan COR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan *softcopy* Tanda Terima SKD yang sudah terdapat pada *website* resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham *warkat/script*, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRASI, Gedung Plaza Sentral, Lt.2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666.
- Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Apabila terdapat masalah penyelesaian di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 14 April 2020  
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk  
DIREKSI